PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL RAWAT JALAN PADA RUMAH SAKIT DI KABUPATEN BOGOR (STUDI KASUS DI RUMAH SAKIT MARY, CILEUNGSI HIJAU DAN RUMAH SAKIT SENTOSA, PARUNG, KABUPATEN BOGOR)

TESIS

Untuk memenuhi sebagian pesyaratan

Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi Hukum Kesehatan

Diajukan oleh

Suminah

NIM 15.C2.0070

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2018

T E S I S

PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL RAWAT JALAN RUMAH SAKIT PADA RUMAH SAKIT DI KABUPATEN BOGOR (STUDI KASUS PADA RUMAH SAKIT MARY CILEUNGSI DAN RUMAH SAKIT SENTOSA PARUNG, KABUPATEN BOGOR)

diajukan oleh:

Suminah

NIM 15.C2.0070

Telah disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Dr. dr. M. Nasser Sp.KK., D. Law tanggal 30 Juli 2018

Pembimbing Pendamping

Yovita Indrayati, SH., M.Hum tanggal 30 Juli 2018

FAKULTAS PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM KESEHATAN
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555 ,8505003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail:mh.kes@unika.ac.id http://www.unika.ac.id

Unika SOEGIJAPRANATA

PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : SUMINAH

Nim : 15.C2.0070

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada hari / tanggal : Sabtu, 28 Juli 2018

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. Dr. dr. M. Nasser, Sp.KK., D.Law (.....)
2. Yovita Indrayati, SH., M.Hum (.....)
3. Ignatius Hartyo Purwanto, SH., MH (.....)

Tesis ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada hari / tanggal : Sabtu, 28 Juli 2018

(Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH)

Ketua Program Studi
Magister Hukum

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Nomor	**: 0047 /SK.Rek/X/2013**
Tanggal	**: 07 Oktober 2013**
Tentang	**: PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI TUGAS AKHIR DAN TESIS**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR/ TESIS*)

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi/ tugas akhir/ tesis*) yang berjudul :

PELOKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL RAWAT JALAN PADA RUMAH SAKIT DI KABUPATEN BOGOR (STUDI KASUS DI RUMAH SAKIT MARY, CILEUNGSI HIJAU DAN RUMAH SAKIT SENTOSA, PARUNG, KABUPATEN BOGOR)

ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi/ tugas akhir/ tesis *) ini sebagian atau seluruhnya merupakan ***hasil plagiasi***, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 30 - JULI - 2018

METERAI TEMPEL
6000

(.....)

NIM : 15 . 02 . 0072 .

*) : *hilangkan yang tidak sesuai*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tesis ini. Tesis ini saya susun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program studi Magister Ilmu Hukum, konsentrasi Hukum Kesehatan pada Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.

Tesis ini dibuat berdasarkan adanya Standar Pelayanan Minimal Rawat Jalan Pada Rumah Sakit di Kabupaten Bogor, yang tidak dipenuhi dan menimbulkan masalah bagi pasien.Standar Pelayanan Minimal telah diatur dalam Permenkes No. 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Permenkes ini harus dilaksanakan oleh semua unsur yang bekerja di bidang kesehatan, meski di Kabupaten Bogor tidak ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur mengenai Standar Pelayanan Minimal.

Saya yakin tesis ini dapat terlaksana karena adanya dukungan dari berbagai pihak yang telah banyak membantu sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, ijinkanlah dengan tulus saya ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. F. Ridwan Sanjaya, MS., IEC., sebagai Rektor Universitas Katolik Soegijapranata.
2. Prof. Dr. Ing. LMF Purwanto., sebagai Dekan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.
3. Dr. Marcella Elwina S, SH., CN. M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.
4. Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH, sebagai Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan, yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mendalami bidang hukum kesehatan di Universitas Katolik Soegijapranata.

5. Bapak Ignatius Hartyo Purwanto, SH., MH., sebagai Sekretaris Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata.
6. Bapak Dr. dr. M. Nasser Sp.KK., D. Law., dan ibu Yovita Indrayati, SH., M.Hum.,sebagai pembimbing saya, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya disela kesibukan beliau berdua. Beliau senantiasa dengan sabar selalu membantu saya dan memberikan masukan yang berharga dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Seluruh dosen Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya dalam bidang hukum dan kesehatan sehingga dapat membuka wawasan saya dalam bidang hukum kesehatan.
8. Seluruh staff administrasi yang telah banyak membantu menyediakan semua fasilitas pendukung dalam kegiatan akademik perkuliahan.
9. Teman-teman angkatan 24 di Pascasarjana Hukum Kesehatan yang selalu kompak, saling mendukung dan penuh kekeluargaan dalam belajar dan bersahabat, dari segala bidang ilmu.
10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Direktur Rumah Sakit dan dokter Rumah Sakit Mary, Cileungsi Hijau dan Direktur Rumah Sakit dan dokter Rumah Sakit Sentosa, Parung, yang telah memberi ijin dan dukungannya dalam melakukan penelitian.
11. Kepada suami tercinta dan kedua putri tersayang yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam proses belajar.
12. Kepada semua pihak yang telah membantu dan meberikan dorongan semangat sehingga tesis ini bisa saya selesaikan.

Sebagai manusia normal, saya mengerti jika dalam penulisan tesis ini ada kekurangan dan kekhilafan yang tidak disengaja, maka pada kesempatan ini ijinkan saya untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Terimakasih.

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....i

Kata Pengantar.....iii

Daftar Isi.....vi

Lampiran.....ix

Daftar Singkatan.....x

ABSTRAK.....xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Perumusan Masalah.....5

C. Tujuan Penelitian.....5

D. Manfaat Penelitian.....6

E. Metode Penelitian.....6

1. Metode Pendekatan.....6
2. Spesifikasi Penelitian.....7
3. Definisi Operasional.....7
4. Metode Pengumpulan Data.....8
5. Metode Analisis data.....10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pelaksanaan.....11

- Pengertian.....11

B. Standar Pelayanan Minimal.....11

- Pengertian 11
- Teori Pelayanan Publik.....12
- Prinsip Pelayanan.....12
- Pengaturan Standar Pelayanan Minimal.....13

C. Perlindungan Hukum.....16
- Teori Perlindungan Hukum.....16
- Sarana Perlindungan Hukum.....16

D. Teori Hak (Pasien) dan Persamaan.....17
- Pengertian Hak.....17
- Teori Tentang Hak.....18
- Hak-Hak Pasien.....19

E. Kedudukan Dalam Hukum.....22
- Pengertian Kedudukan Dalam Hukum.....22
- Teori Kedudukan Dalam Hukum.....22

F. Kewenangan.....23
- Pengertian Kewenangan.....23
- Teori Kewenangan.....23
- Ciri Aspek Kewenangan.....24

G. Rawat Jalan.....25
- Pengertian Rawat Jalan.....25
- Teori Rawat Jalan.....25
- Jenis Pelayanan Rawat Jalan.....26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Standar Pelayanan Minimal rawat Jalan di Kabupaten Bogor kaitannya dengan perlindungan pasien.....27

a) Hasil Penelitian.....27

1) Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.....27

2) Rumah Sakit Mary Cileungsi Hijau.....28

3) Rumah Sakit Sentosa, Parung.....29

b) Pembahasan.....29

Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan.....34

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan.....40

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Rawat Jalan di Kabupaten Bogor.....42

a. Hasil Penelitian.....42

a. Faktor Pendukung.....42

b. Faktor Penghambat.....43

b. Pembahasan.....44

3. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Rawat Jalan di Kabupaten Bogor.....44

a. Hasil Penelitian.....44

b. Pembahasan.....46

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN.....51

B. SARAN.....54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 2. Surat Penolakan Melakukan Penelitian

DAFTAR SINGKATAN

Permenkes	: Peraturan Menteri Kesehatan
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
No.	: Nomor
PBI	: Penerima Bantuan Iuran
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
Polri	: Polisi Republik Indonesia
RI	: Republik Indonesia
PK	: Peninjauan Kembali
PDT	: Perdata
PT. PLG	: Pengadilan Tinggi. Palembang
PN	: Pengadilan Negeri
PT	: Perseroan Terbatas
KUH Perdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kab.	: Kabupaten
Dinkes	: Dinas Kesehatan
Dijen	: Direktorat Jenderal
Depkes	: Departemen Kesehatan
Yankesruj	: Pelayanan Kesehatan dan Rujukan
Renstra	: Rencana Strategis
PER	:Peraturan
Menkes	: Menteri Kesehatan
Renja	: Rencana Kerja
RJPMD	:RencanaJangka Pendek dan Menegah Daerah

ABSTRAK

Standar Pelayanan Minimal dibuat agar menjadi panduan bagi daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan di rumah sakit, sebagi indikator kerja yang diselenggarakan oleh pengelola rumah sakit. Dalam bidang kesehatan, Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan diatur di dalam Permenkes No. 43 Tahun 2016.Digunakan sebagai alat untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata yang ditetapkan dan dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Pusat. Standar Pelayanan Minimal Kesehatan pada Pasien Rawat Jalanpada Rumah Sakit, sangat penting kaitannya dengan pelayanan dan sangat berkaitan dengan perlindungan pada pasien rawat jalan di rumah sakit.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang diambil dengan teknik wawancara kebeberapa pihak yaitu Kepala Dinas Kabupaten Bogor, Direktur Rumah Sakit Mary, Cileungsi Hijau, Direktur Rumah Sakit Sentosa, Parung, Kepala Unit Rawat Jalan Rumah Sakit Mary, Cileungsi Hijau, dan Kepala Unit Rumah Sakit Sentosa, Parung.

Namun yang ditemukan di Kabupaten Bogor, Permenkes No. 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatantidak berjalan dengan baik.Tidak adanya pengaturan Standar Pelayanan Minimal yang dikeluarkan oleh Pemda (Pemerintah Daerah) Kabupaten Bogor, membuat Dinas Kesehatan masih menjalankan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan peraturan yang ada yaitu mengacu kepada Renstra Dinas Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Seharusnya Kabupaten Bogor mengacu kePermenkes No. 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, agar pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal rawat jalan pasien dapat terlaksana dengan baik.

Kata Kunci : Standar pelayanan minimal, Rawat jalan, Rumah Sakit.

ABSTRACT

Minimum Service Standards were made to serve as guidance for regions in organizing hospitals. The standards were then used asworking indicators by the hospital management. In the field of health, the Minimum Service Standards were regulated by Health Minister's Decree Nr. 43 of 2016. It was used as a tool to ensure even basic services access and quality to the community that was established and accountable to the Central Government. The Minimum Health Service Standards were very important for hospital's outpatients in relation with the services provided and were closely related to the outpatient's protection.

This research applied socio-legal approach having analytical-descriptive specification. The data were gathered by having interviews to some resources, namely Head of Health Office of Bogor District, Director of Mary Hospital of Cileungsi Hijau, Unit Head of Sentosa Hospital of Parung.

The results of the research showed that the Health Minister's Decree Nr. 43 of 2016 on Minimum Service Standards in Health Fieldhad not well implemented. The absence of minimun service standards setting issued by the Local Government, namely Bogor District, had made the health services run the minimum service standards in accordance with the existing regulations that referred to Health Office's Strategic Planning (Renstra) and Health Minister's Regulation on Hospital Classification and Permit. Bogor District should refer to the Health Minister's Decree Nr. 43 of 2016 on Minimum Service Standards in Health Field so that the implementation of minimum services standards to outpatients could be well performed well.

Keywords:*minimum service standards, outpatient, hospital.*